

# Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Alam Kea-Kea Mangolo di Kabupaten Kolaka

Abdul Sabaruddin <sup>1\*</sup>, Maulid <sup>2</sup>, Taslim Fait <sup>3</sup>, Maharani <sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Prodi Administrasi Publik-Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia

<sup>1</sup> abdulSabaruddin@gmail.com\*

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

### Article history

Received : 06-11-2023

Revised : 11-12-2023

Accepted : 25-12-2023

### Keywords

Stakeholders ;

Tourism ;

tourism development ;

## ABSTRACT

*Stakeholder involvement in tourism development is crucial to overcome the limited resources held by each actor. Kea-Kea Natural Tourist Attraction in Mangolo Village, Latambaga Sub-district, is one of the tourist attractions whose development involves various stakeholders. The purpose of this research is to identify stakeholders and the roles they play in the development of Kea-Kea natural attractions. The method used in this research is qualitative descriptive. The research results found that the actors involved in the development of Kea-Kea natural attractions are the Kolaka Regency Tourism Office and the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) of Southeast Sulawesi Province as key stakeholders. Then, the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) is a primary stakeholder, while companies (business sector) and the community are secondary stakeholders. The role of each stakeholder is highly strategic in the development of the tourist attraction. The government and BKSDA play a role in preparing road infrastructure, marketing (promotion), and preserving the nature of the tourist attraction. The business sector is involved in providing tourism facilities and infrastructure. Pokdarwis plays a role in maintaining cleanliness, preserving, and repairing supporting facilities at the tourist attraction locations, and collecting fees. However, the contribution of stakeholders to the development of Kea-Kea natural attractions has not been maximized due to budget constraints and a lack of stakeholder awareness of the importance of tourism development.*

## PENDAHULUAN

Parawisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Upaya pengembangan obyek wisata di beberapa daerah cukup meningkat, hal ini didukung dengan kuatnya komitmen pemerintah dalam pengembangan parawisata. Keseriusan pemerintah menjadikan sektor parawisata sebagai sumber ekonomi bagi daerah ditujukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelibatan stakeholders.

Pelibatan stakeholders dalam pengembangan parawisata menjadi penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pengembangan parawisata. Keterbatasan sumber daya pemerintah baik keuangan, sumberdaya manusia maupun sumberdaya teknologi menjadi alasan untuk membangun kerjasama dengan aktor lain dalam pengelolaan dan pengembangan parawisata. Selain itu, menurut Destiana et al., (2020) peran stakeholder juga dapat menghasilkan perencanaan strategi pariwisata yang merepresentasikan banyak kepentingan dan menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang efektif dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi parawisata. Salah satunya, parawisata alam Kea-Kea yang berada di Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga. Untuk mengembangkan obyek wisata dan penguatan fungsi kawasan di taman wisata air panas tersebut, balai konservasi sumber daya alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kolaka.



Aktor lainnya yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan parawisata tersebut adalah masyarakat. Masyarakat memiliki posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan pengembangan dan pengelolaan parawisata, karena merekalah yang memahami potensi wilayahnya. Wearing (2001) menjelaskan masyarakat sebagai salah satu pelaku yang memiliki peran yang sama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata (Purba et al., 2012). Pendapat ini diperkuat oleh Raharjana (2012) bahwa keberhasilan pembangunan apapun bentuknya, termasuk pariwisata sudah semestinya melibatkan masyarakat sebagai subjek. Warga setempat diberi hak mutlak untuk ikut menentukan masa depan (Redyanto et al., 2018).

Karena itu keberhasilan pengembangan parawisata alam Kea-Kea tidak lepas dari keterlibatan banyak aktor dengan peran yang dimilikinya. Pitana & Gayatri (2005) menyatakan jika ada tiga stakeholder utama yang dianggap berperan penting dalam pengembangan destinasi pariwisata, yaitu pemerintah, pelaku usaha/swasta, dan masyarakat (Simanjorang et al., 2020). Keterlibatan aktor-aktor tersebut akan mendorong perencanaan pengembangan parawisata lebih terarah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan sektor parawisata. McComb et al (dalam Ariyani et al., 2020) yang menyatakan bahwa kolaborasi antar stakeholder sangat menentukan keberhasilan pariwisata yang berkelanjutan.

Namun dalam pengembangan parawisata alam Kea-Kea hubungan antar aktor yang terlibat belum memahami perannya sehingga keterlibatannya dalam mendukung kegiatan-kegiatan dalam menunjang pengembangan parawisata belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis aktor dalam pengembangan parawisata alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi stakeholder dan peran stakeholder dalam pengembangan parawisata Kea-Kea mengingat parawisata Kea-Kea merupakan destinasi wisata lokal yang memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena keindahan alamnya.

## METODE PENELITIAN

Dalam membahas masalah dalam riset ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif. Tujuan riset akan dijawab dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Penentuan informan riset digunakan teknik *purposive sampling*, dimana peneliti telah menentukan informan yang dianggap paling mengetahui data apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Narasumber dalam penelitian ini terdiri kepala dinas pariwisata, pegawai BKSDA, pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga, pimpinan organisasi pariwisata (Pokdarwis), pelaku usaha pariwisata, dan beberapa penduduk sekitar.

Data penelitian selanjutnya dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, Saldana (2014). Tahapan dalam analisis data meliputi tahap pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan data, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data yang diperoleh dari catatan lapangan dan wawancara, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun, menyatukan, dan menyimpulkan data. Tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dengan merangkum seluruh data yang telah dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Identifikasi Stakeholder dalam Pengembangan Obyek Wisata Alam Kea-Kea

Wisata alam Kea-Kea berlokasi di Kelurahan Mangolo Kecamatan Kolaka yang berjarak sekitar 17 kilometer dari ibukota Kabupaten Kolaka. Obyek wisata yang memiliki daya tarik dengan keindahan alamnya dan air panas alami yang bersumber dari bumi menjadi salah kawasan potensial yang dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Dalam rangka mewujudkan pengembangan obyek wisata alam tersebut sangat dipengaruhi oleh *stakeholders* (pemangku kepentingan). Menurut Goeldner dan Ritchie (dalam Amoako et al., 2022), ada empat stakeholder yang berperan dalam pengembangan pariwisata, yaitu wisatawan, pelaku usaha (pengusaha) yang menyediakan barang dan jasa pariwisata, pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa ada tiga tipe stakeholder dalam pengembangan obyek wisata alam Kea-Kea adalah:

- a. Stakeholder primer yaitu pemangku kepentingan yang secara langsung merasakan dampak kegiatan pengembangan wisata alam Kea-Kea. Termasuk stakeholder ini adalah organisasi Pokdarwis dan masyarakat lokal (pedagang). Pokdarwis merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka sebagai wadah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan wisata dengan tugas utama mengatur dan menjaga lokasi-lokasi wisata. Di kawasan wisata Kea-Kea, tercatat 20 (dua puluh) anggota pengelola Pokdarwis yang bertugas memungut retribusi wisata dari para wisatawan, khususnya retribusi parkir, toilet, gazebo, tempat berjualan, dan flying fox. Pihak penting berikutnya adalah masyarakat sekitar, yaitu mereka yang berjualan di Taman Wisata Alam Kea-Kea.
- a. Stakeholder sekunder yaitu pemangku kepentingan penunjang dalam mengembangkan obyek wisata alam Kea-Kea. Stakeholder ini yakni perusahaan/dunia usaha. Dalam pandangan McGlashan dan Williams (2003) yang dikutip Marzuki dan Hay, (2013) masyarakat termasuk stakeholder lokal (Mahrizi & Khalfan, 2021). Perusahaan yang terlibat dalam pengembangan obyek wisata ini adalah BRI Cabang Kolaka, PT Antam Tbk, dan Pegadaian dalam bentuk pemberian bantuan berupa fasilitas penunjang obyek wisata berupa gazebo, spot foto dan *flying fox*. Berdasarkan pandangan Gray (1989) yang dikutip Clarkson, (1995); Safti (2011), stakeholder primer dan sekunder dikategorikan sebagai stakeholder fungsional. Stakeholder primer adalah mereka yang sangat penting dalam keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pariwisata, yakni organisasi pemerintah, organisasi pengelola destinasi, hotel, penduduk, atraksi pariwisata, dan perusahaan transportasi. Stakeholder sekunder adalah mereka yang tidak terlibat dalam transaksi bisnis tetapi masih memiliki keterkaitan seperti Kamar Dagang, kelompok masyarakat, SPBU, lembaga perencana program pengembangan pariwisata, media, dan universitas (Mahrizi & Khalfan, 2021).
- b. *Stakeholder kunci*. Yang menjadi stakeholder kunci dalam pengembangan wisata alam Kea-Kea adalah pemerintah daerah Kabupaten Kolaka (Dinas Parawisata) dan Dinas BKSDA. Pelibatan BKSDA sebagai pengelola wisata karena obyek wisata alam Kea-Kea merupakan kawasan hutan yang berada di bawah pengawasan BKSDA Sulawesi Tenggara. Sementara pemerintah Kabupaten Kolaka merupakan pihak yang berwenang dalam membuat peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada obyek wisata di Kabupaten Kolaka termasuk obyek wisata Kea-Kea, melalui Peraturan Bupati Kolaka Nomor 7 Tahun 2019. Dalam perkembangannya, BKSDA dan Pemerintah Kabupaten Kolaka membuat MoU (*momerandum of understanding*) sebagai dasar pengelolaan wisata alam Kea-Kea. Stakeholder ini dalam pandangan McGlashan dan Williams (2003) yang dikutip Marzuki dan Hay, (2013) termasuk stakeholder institusional. Stakeholder institusional adalah para ahli dan profesional di pemerintahan (Mahrizi & Khalfan, 2021).

## 2. Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Obyek Wisata Alam Kea-Kea

Peran para stakeholder untuk mencapai keberhasilan pengembangan pariwisata sangatlah penting. Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan pariwisata dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan sumberdaya termasuk budaya masyarakat setempat. Hal ini sesuai pandangan Khalid et al (2019) bahwa salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengelolaan. Pelibatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengedukasi dan menginformasikan apa saja kebutuhan mereka dan bagaimana hal tersebut harus dipertimbangan dalam perencanaan. Selain itu, perlunya menelusuri keterlibatan stakeholder dalam pembangunan, untuk mengetahui apakah kepentingan stakeholder memberikan manfaat bagi masyarakat (Risteska, 2019).

Karena itu, pembangunan pariwisata tergantung pada partisipasi para stakeholder dan tidak akan terwujud tanpa ada dukungan dan peran dari mereka. Sehingga diperlukan komitmen dan pemahaman bersama diantara stakeholder sejauhmana partisipasi, dukungan, dan sikap dalam merencanakan pembangunan pariwisata. Menurut Reacher, et al (2005) para pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan di semua tahap, dan

memastikan keterlibatan mereka harus seimbang, efektif, dan memberikan kontribusi informasi, kebijakan, dan dukungan stabilitas (Habtmu Bekana, 2023).

Dalam pengembangan obyek wisata alam Kea-Kea, peran stakeholder dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pemerintah

Keterlibatan Pemerintah dalam pengembangan pariwisata sangat strategis terutama dalam menyusun program untuk mendukung pengembangan pariwisata misalnya penyediaan infrastruktur, perlindungan dan pelayanan kepada wisatawan. Hasil penelitian memberikan penjelasan, aktor utama pemerintah yang terlibat dalam pengembangan obyek wisata alam Kea-Kea adalah :

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka

Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 24 Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka berfungsi merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas kemudian bertanggungjawab dalam menyiapkan kerangka kerja untuk kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kolaka termasuk di obyek wisata alam-alam Kea-Kea. Peran dinas ini diantaranya membangun fasilitas dan infrastruktur pariwisata, mengembangkan daya tarik wisata, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola pariwisata dan meningkatkan pemasaran/promosi.

Berdasarkan keterangan informan, Dinas Pariwisata dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan lembaga utama yang melakukan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kolaka. Berbagai program Dinas Pariwisata diantaranya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka perbaikan pelayanan dengan menyiapkan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, gazebo, aula, area bermain anak, *cottage*/penginapan, spot foto dan fasilitas umum seperti toilet, dan tempat ibadah.

Dinas juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan pariwisata Kea-Kea dan melaksanakan penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada lokasi obyek wisata berdasarkan peraturan Bupati Kolaka Nomor 7 Tahun 2019.

Namun, berdasarkan keterangan narasumber peran Dinas Pariwisata dinilai kurang optimal dalam mendukung pengembangan wisata di Kabupaten Kolaka, termasuk objek wisata alam Kea-Kea. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pemerintah daerah. Retribusi dari objek wisata yang diharapkan dapat menjadi sumber dana pengembangan objek wisata ternyata mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 sekitar Rp. 12. 515.000, tahun 2021 Rp. 4.180.000, dan tahun 2022 hanya Rp. 5.305.000. Padahal, target pendapatan pemerintah daerah dari sektor pariwisata sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun. Meskipun demikian, berbagai upaya terus dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan dunia usaha seperti Bank BRI Cabang Kolaka, Pegadaian Kolaka, dan PT Antam Tbk UBPN Sultra, serta media di Kabupaten Kolaka yang tujuannya untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Kolaka.

2. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara

Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran penting dalam menjaga obyek wisata alam Kea-Kea, sebab obyek wisata ini menjadi wilayah konservasi yang perlu dijaga kelestariannya agar obyek wisata tersebut tetap terjaga nilai wisatanya. Untuk menjaga kelestarian alam obyek wisata tersebut BKSDA Sulawesi Tenggara berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka melalui perjanjian kerjasama Nomor: PKS.05/K.25/TU-5/1/2017 tentang pengembangan wisata alam di taman wisata Kea-Kea Mangolo.

## b. Sektor Bisnis

Sektor bisnis dalam pengembangan obyek wisata alam Mangolo Kea-Kea mempunyai peran yang strategis, yakni berperan sebagai pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan sarana dan prasarana seperti sarana gazebo, pemasangan fasilitas air bersih dan penyediaan spot foto. Berdasarkan hasil penelitian, badan usaha yang ikut berpartisipasi dalam penyediaan sarana penunjang di obyek wisata alam Kea-Kea Mangolo yakni BRI, PT Antam Tbk, dan Pegadaian. Fasilitas tersebut kemudian dihibakan untuk menjadi asset pemerintah daerah, namun fasilitas tersebut saat ini ini kurang terawat. Berikut fasilitas yang tersedia dalam kawasan obyek wisata alam Kea-Kea.

Tabel 1. Fasilitas yang tersedia dalam kawasan obyek wisata alam Kea-Kea.

NO	SARANA DAN PRASARANA	VOLUME
1	Pendopo/Aula	2 Unit
2	Cottage	3 Unit
3	Kamar Ganti	3 Unit
4	Jalan Setapak	200 m
5	Pembangunan Sumur Jodoh	1 Unit
6	Instalasi Air Bersih	1 Paket
7	Mainan Anak-anak	1 Paket
8	Taman Bunga	1 Paket
9	Gazebo	13 Unit
10	Musholla	1 Unit
11	Tempat Sampah	40 Unit
12	Pembangunan Sumur Jodoh	1 Unit
13	Instalasi Air bersih	1 Paket
14	Photo Booth	3 Unit
15	Pembangunan Area Parkir	1 Paket
16	Pembangunan Kios Kuliner	2 Paket
17	Pembangunan Talud/Bronjong	1 Paket
18	PLTMH Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH)	1 Paket
19	Kolam Air Panas	1 Paket

Sumber: Dinas Parawisata Kabupaten Kolaka

## c. Kelompok Masyarakat

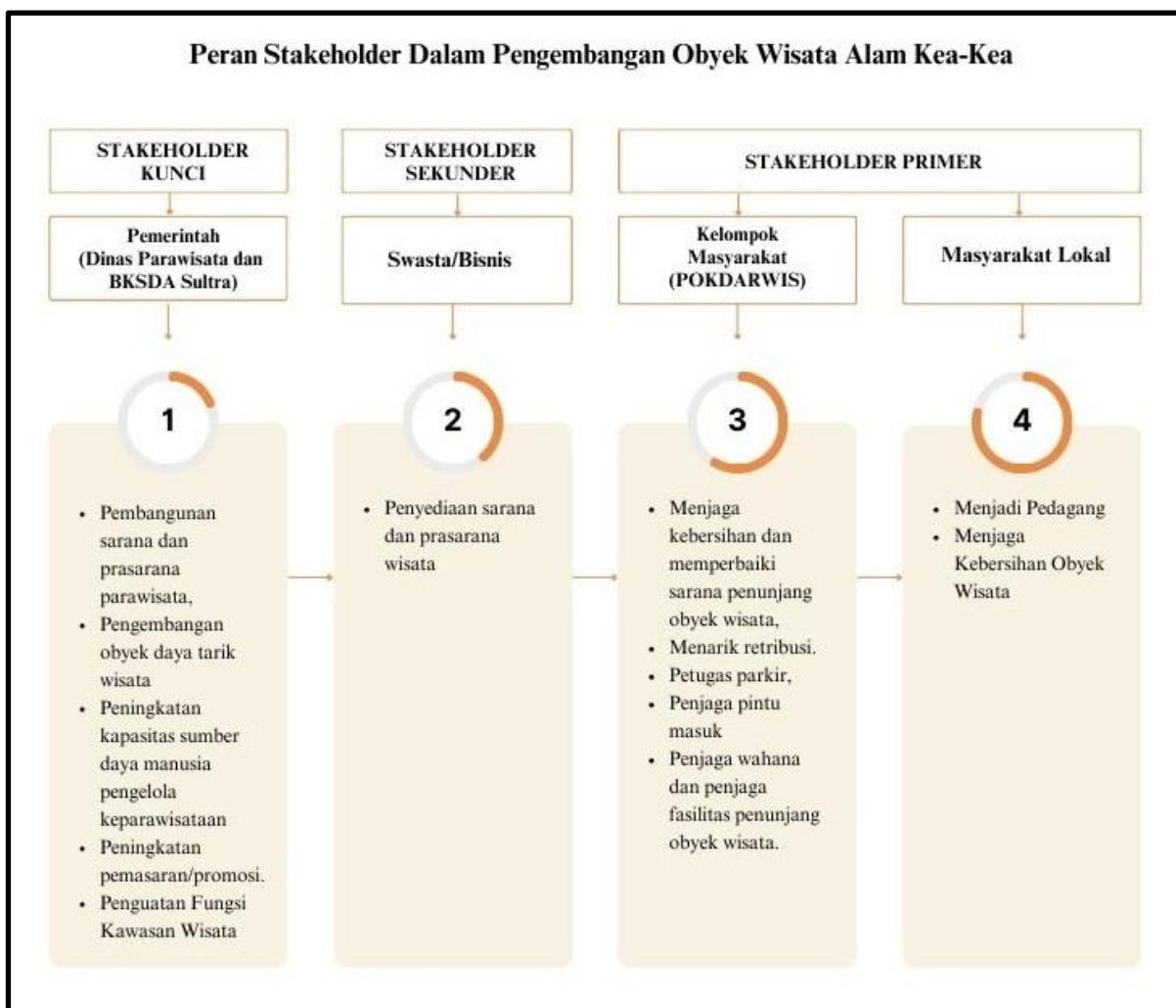
Stakeholder lainnya yang terlibat dalam pengembangan obyek wisata alam Kea-Kea Mangolo adalah masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan masyarakat atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pokdarwis adalah menjaga kebersihan, merawat dan memperbaiki fasilitas pendukung di lokasi objek wisata, dan memungut retribusi. Pokdarwis dibina dan diawasi oleh Dinas Pariwisata. Anggota Pokdarwis bertugas sebagai pengelola parkir, penjaga tiket masuk, tenaga kebersihan, petugas wahana dan penjaga fasilitas pendukung wisata. Kelompok sadar wisata ini adalah masyarakat lokal di sekitar lokasi objek wisata.

## d. Masyarakat Lokal

Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya di lokasi obyek wisata. Keterlibatan masyarakat lokal di lokasi wisata adalah menjadi pedagang dan ikut menjaga kebersihan lokasi obyek wisata. Menurut Hardy sebagaimana dikutip Mesfin, Amane &



Tadesse (2017) diantara para stakeholder pariwisata, masyarakat lokal dipandang sebagai sumber daya penting yang secara khusus menjaga sumber daya alam, dan secara sukarela atau tidak sukarela dalam menyediakan lokasi untuk kegiatan pariwisata dari sebagian dari fungsi lahan mereka (Habtamu Bekana, 2023). Sementara menurut Tonkovic, Veckie, & Veckie (dalam Halibas et al., 2017) organisasi masyarakat sipil merupakan kelompok penting yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial baik dalam pembangunan lokal maupun regional. Mereka biasanya penerima dana, bantuan dan subsidi pemerintah. Partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan dan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan yang komprehensif sangatlah penting. Namun hasil penelitian menunjukkan, peran Pokdarwis dan masyarakat lokal belum memiliki komitmen untuk terlibat dalam pengembangan parawisata alam Kea-Kea Mangolo. Salah satu hambatannya adalah kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya pengembangan parawisata. Mereka belum melihat sektor parawisata sebagai sektor pembangunan ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan mereka. Meskipun demikian, Pokdarwis dan masyarakat lokal mengakui mereka telah memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan yang berkunjung dengan memelihara fasilitas yang ada di sekitar lokasi wisata. Peran masing-masing aktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, stakeholder yang terlibat dalam pengembangan obyek wisata alam Kea-Kea yakni pemerintah dalam hal ini Dinas Parawisata Kabupaten Kolaka dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara, kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pengusaha, dan masyarakat. Dilihat dari pengklasifikasian

stakeholder, stakeholder primer (pemerintah), stakeholder kunci (kelompok masyarakat—Pokdarwis) dan stakeholder sekunder (bisnis dan masyarakat).

Para stakeholder dalam pengembangan obyek wisata alam Kea-Kea yakni pemerintah bertanggungjawab dalam menyiapkan kerangka kerja dalam pengembangan obyek wisata. Diantaranya, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pengembangan obyek wisata, pemasaran atau promosi, penyiapan infrastruktur jalan dan bekerjasama dengan BKSDA Sulawesi Tenggara dalam menjaga kelestarian alam obyek wisata. Sektor bisnis terlibat dalam penyediaan layanan sarana dan prasarana seperti sarana gazebo, pemasangan fasilitas air bersih dan penyediaan spot foto. Pokdarwis berperan dalam menjaga kebersihan, menjaga dan memperbaiki sarana penunjang lokasi obyek wisata, serta menarik retribusi. Terakhir, aktor masyarakat lokal terlibat dalam menjaga kebersihan dan menjual kebutuhan wisatawan. Namun kontribusi stakeholder dalam pengembangan obyek wisata belum maksimal karena disebabkan keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran stakeholder akan pentingnya pengembangan pariwisata.

Saran kedepan, para stakeholder perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta keahlian dan profesionalisme dalam pengelolaan obyek wisata alam Kea-Kea. Kemudian perlu adanya pelatihan bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan obyek wisata untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya industri pariwisata. Serta perlunya membangun kemitraan atau kolaborasi dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Karena itu, penelitian kedepan penting dilakukan mengenai kolaborasi Penta Helix (pemerintah, bisnis, masyarakat, dan media massa) dalam pengembangan obyek wisata.

## REFERENSI

- (1) Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132–153. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.18>
- (2) Purba, G. P., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2012). Model Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 209–183.
- (3) Redyanto, F., Salahudin, S., & Salviana, V. (2018). Model Kerjasama Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. *LOGOS (Journal of Local Government Issues)*, 1–24.
- (4) Simanjong, F., Hakim, L., & Sunarti, S. (2020). Peran Stakeholder Dalam Pembangunan Pariwisata Di Pulau Samosir. *Profit*, 14(01), 42–52. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.01.5>
- (5) Ariyani, N., Fauzi, A., & Umar, F. (2020). Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 357–378. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3420>
- (6) Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Third Edition*.
- (7) Amoako, G. K., Obuobisa-Darko, T., & Ohene Marfo, S. (2022). Stakeholder role in tourism sustainability: the case of Kwame Nkrumah Mausoleum and centre for art and culture in Ghana. *International Hospitality Review*, 36(1), 25–44. <https://doi.org/10.1108/ihr-09-2020-0057>
- (8) Mahrizi, A., & Khalfan, A. S. (2021). *The role of stakeholder participation in tourism planning in Oman*. [http://theses.ncl.ac.uk/jspui/handle/10443/5385%0Ahttps://theses.ncl.ac.uk/jspui/bitstream/10443/5385/1/AI Mahrizi A S K 2021.pdf](http://theses.ncl.ac.uk/jspui/handle/10443/5385%0Ahttps://theses.ncl.ac.uk/jspui/bitstream/10443/5385/1/AI%20Mahrizi%20A%20S%20K%202021.pdf)
- (9) Risteska, B. P. (2019). Stakeholders in Sustainable Tourism Development. *TISC-Tourism International Scientific Conference* ....

<http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/298>

- (10) Habtamu Bekana, K. (2023). Stakeholders' Involvement in Tourism Development for Poverty Alleviation: The Case of Suba Forest, Ethiopia. *International Journal of Science and Qualitative Analysis*, June. <https://doi.org/10.11648/j.ijsqa.20230901.12>
- (11) Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The penta helix model of innovation in Oman: An hei perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12, 159–172 .